

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

REKA A. ABUBAKAR

E2119147

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

REKA A. ABUBAKAR
E2119147


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 29 Maret 2023

PEMBIMBING I


TAMSIR, SE., MM
NIDN. 0920057403

PEMBIMBING II


NG SYAMSIAH B., SE., MM
NIDN. 0921018003

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POHUWATO**

OLEH:

REKA A ABUBAKAR

E2119147

**Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo**

1. **HARIS HASAN, SE., MM** :
(Ketua Penguji)
2. **SRI DAYANI ISMAIL, SE., MM** :
(Anggota Penguji)
3. **SULERSKI MONOARFA, S.Pd., M.Si** :
(Anggota Penguji)
4. **TAMSIR, SE., MM** :
(Pembimbing Utama)
5. **NG SYAMSIAH.B, SE., MM** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. MUSA FIR, SE., M.Si
NIDN: 0928116901

Ketua Program Studi Manajemen

SYAMSUL, SE., M.Si
NIDN: 0921108502

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan?

(Qs : Ar-Rahman 13)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(Qs. Al-insyirah 6-7)

(Reka A. Abubakar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘ alamin sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini

kupersembahkan untuk

kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakanku. Kakakku dan adik-adiku yang selalu mengingatkan dan memberikan ku semangat serta teman-temanku yang selalu menemani baik suka maupun.

Semoga limpahan rahmat dan cinta kasih Allah SWT selalu di sertakan

Aminyaa robbal alamin.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU
2023**

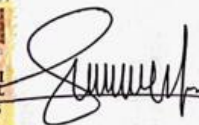
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo, 29 Maret 2023
Yang membuat pernyataan




Reka A. Abubakar
NIM : E2119147

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato”, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
- Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Syamsul, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Tamsir, SE., MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Ibu Ng Syamsiah. B, SE., MM, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.

- Bapak Yunus Mohamad, S.Pd., MH, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis selama penyusunan usulan penelitian ini.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, jika terdapat kelebihan dalam Skripsi ini, maka semua datangnya dari Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Januari 2023

(Penulis)

ABSTRACT

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, REPORTING, AND EVALUATION ON THE PERFORMANCE AT THE POHUWATO DISTRICT TRANSPORTATION OFFICE

Measurement of local government performance is directed at each work unit that has been authorized to manage resources as their field. Each work unit is a responsibility center that has its uniqueness. The purpose of this study is to find and analyze the effect of budget planning, reporting, and evaluation on the performance at the Pohuwato District Transportation Office, involving 30 respondents using multiple regression analysis tools. Based on the processed data results using SPSS-16, the obtained t-count value is $2.098 > t\text{-table value of } 2.056$, which means that planning (X1) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. Similarly, a significance value of 0.046 is obtained, greater than the significant level used, namely 0.05 or 5% ($0.046 < 0.05$). The t-count value of $2.060 > t\text{-table of } 2.056$ and supported by a significant value of 0.05 or 5%, which means that reporting (X2) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The t-count value is $0.238 < t\text{-table of } 2.056$, meaning that evaluation (X3) has a positive but insignificant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The F-count value of $3.208 > F\text{-table of } 2.980$ with the probability of error F-count is smaller than the specified error level (α) $0.040 < 0.005$. The variables of planning (X1), reporting (X2), and evaluation (X3) simultaneously affect the performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office.

Keywords: planning, reporting, evaluation, performance

ABSTRAK

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. PENGARUH PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yang melibatkan 30 responden dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,098 > \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar $2,056$. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,046$ yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu $0,05$ atau 5% ($0,046 < 0,05$). Nilai t_{hitung} sebesar $2,060 > t_{tabel}$ sebesar $2,056$ dan didukung dengan nilai signifikan $0,05$ atau 5% , yang berarti bahwa variabel pelaporan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Nilai t_{hitung} sebesar $0,238 < t_{tabel}$ sebesar $2,056$. Yang berarti bahwa variabel evaluasi (X_3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan nilai F_{hitung} sebesar $3,208 > F_{tabel}$ sebesar $2,980$ dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,040 < 0,005$. Dengan demikian variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: perencanaan, pelaporan, evaluasi dan kinerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kinerja	7
2.2. Kinerja Pemerintah	9
2.3. Anggaran	17
2.4. Perencanaan Anggaran	19
2.5. Pelaporan Realisasi Anggaran	21
2.6. Evaluasi Anggaran	24
2.7. Kerangka Pikir	25
2.8. Hipotesis	26
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	27
3.1. Objek Penelitian.....	27
3.2. Metode Penelitian	27
3.2.1. Desain Penelitian	27
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	28
3.2.3. Populasi dan Sampel	30
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.5. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato	33
4.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	37
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Variabel Kinerja (Y)	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan (X1)	43
4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Pelaporan (X2)	47
4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Evaluasi (X3)	48
4.3. Analisis Regresi Berganda	50
4.3.1. Uji Parsial (Uji t)	51
4.3.2. Uji Statistik F (Uji Simultan)	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 4.1. Struktur Organisasi</i>	<i>38</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian</i>	29
<i>Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden</i>	39
<i>Tabel 4.2. Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja (Y)</i>	39
<i>Tabel 4.3. Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja (Y)</i>	41
<i>Tabel 4.4. Tanggapan Responden Pada Variabel Perencanaan (X1)</i>	43
<i>Tabel 4.5. Tanggapan Responden Pada Variabel Perencanaan (X1)</i>	45
<i>Tabel 4.6. Tanggapan Responden Pada Variabel Pelaporan (X2)</i>	47
<i>Tabel 4.7. Tanggapan Responden Pada Variabel Evaluasi (X3)</i>	48
<i>Tabel 4.8. Analisis Regresi Berganda</i>	50
<i>Tabel 4.9. Model Summary</i>	51
<i>Tabel 4.10. Uji t</i>	52
<i>Tabel 4.11. Uji F</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Jadwal Penelitian</i>	<i>59</i>
<i>Lampiran 2. Kuisioner Penelitian</i>	<i>60</i>
<i>Lampiran 3. Tabulasi Data</i>	<i>64</i>
<i>Lampiran 4. Output SPSS-16</i>	<i>68</i>
<i>Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian</i>	<i>74</i>
<i>Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian</i>	<i>75</i>
<i>Lampiran 7. Surat Bebas Plagiasi</i>	<i>76</i>
<i>Lampiran 8. Hasil Turnitin</i>	<i>77</i>
<i>Lampiran 9. Curriculum Vitae</i>	<i>81</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi good governance. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan good governance.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu.

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam

praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang belum optimal sehingga berakibat pada kinerja organisasi, yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah dimana pemerintah daerah sebagai penerima wewenang dalam mengelolah organisasi perlu melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian kinerja organisasi yang baik. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya, ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan kinerja dalam segala hal. Hal ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah agar bersungguh sungguh dalam melakukan pekerjaannya sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi yang menaunginya. Agar tidak terjadi permasalahan permasalahan dalam menjalankan kewajibannya khususnya yang terkait dengan permasalahan anggaran.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan

kumpulan RKA SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran. Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan anggaran. Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah daerah.

Tak terlepas dari permasalahan anggaran, kinerja organisasi pada instansi di daerah pada umumnya terbilang belum optimal hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Laporan keuangan Tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Selain itu, pengelolaan keuangan pada bendahara umum daerah tidak tertib dan Laporan Keuangan Tahun 2021 tidak berdasarkan laporan konsolidasian, penyusunan anggaran belanja daerah tidak tertib.

Melihat dari permasalahan diatas berupa alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang semestinya, memerlukan perencanaan anggaran yang baik selain itu, menghindarkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) alokasi belanja, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah pelaporan dan evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut.

Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini

dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja. Sehingga dalam penelitian ini perencanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi anggaran dikaitkan untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kinerja instansi terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :
 “Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
2. Apakah pelaporan anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
4. Apakah perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data mengenai Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh perencanaan anggaran secara parsial terhadap terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
2. Pengaruh pelaporan anggaran secara parsial terhadap terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
3. Pengaruh evaluasi anggaran secara parsial terhadap terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
4. Pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian-penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

yang terkhusus dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran terhadap kinerja instansi.

2. Manfaat Praktisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Instansi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran.

3. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-teori ilmu manajemen, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja sebagai hasil -hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi (Putri, 2014).

Menurut Stoner dalam Salbiah dan Risky (2012), kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Kumorotomo (2005:103) dalam Anggraeni 2013, mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah “hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”.

Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa: Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya, membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja (Kusuma, 2013).

2.2. Kinerja Pemerintah

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013:33).

Menurut Mardiasmo (2009:72) bahwa kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tindak lanjut dari anggaran adalah penyerapan anggaran yang telah dibuat lalu mengalokasikannya sesuai dengan apa yang ada di Anggaran Penerimaan Belanja Daerah.

Dalam hal ini, yang ditindaklanjuti adalah penyerapan terhadap kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan penyerapan anggaran adalah menindaklanjuti dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN atau APBD.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang lambat telah menjadi permasalahan sebagian besar satuan kerja K/L setiap tahun anggaran, sehingga keberhasilan pelaksanaan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja) masih menjadi isu yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan (Sriharioto, 2012).

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya

dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi iddle money. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis (BPKP, 2011). Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran serta kualitas penyerapan anggaran ini antara lain disebabkan oleh lemahnya perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker). Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, yang akan berdampak pada kualitas dokumen anggaran (DPA), dan dalam pelaksanaan anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian, termasuk revisi DPA.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA.

PP No.58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (SiLPA) yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun anggaran berikutnya (SiLPA)

merupakan indikator dalam menilai kualitas penganggaran pada pemerintah daerah (Abdullah, 2013:12).

Sisa anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggarannya serta keakuratan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan. Namun, sisa anggaran juga mengindikasikan “pemborosan” karena adanya dana “menganggur” yang tidak teralokasikan secara efektif selama tahun anggaran berjalan (Abdullah, 2013:13).

Dalam praktiknya, akan sulit untuk mencapai realisasi anggaran belanja seratus persen. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia selalu melaporkan adanya sisa anggaran atau anggaran tidak terserap seratus persen pada akhir tahun. Sisa anggaran yang besar mencerminkan daya serap anggaran yang rendah. Para ekonom memandang rendahnya tingkat serapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (BPKP, 2011).

Rasio realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektifitas belanja negara. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2009:132).

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2009:121) bahwa akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telahditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandinganperbandingan outcome dengan output.

Sedangkan menurut Mahmudin (2010:4) bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam stategic planning suatu organisasi.

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu

mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya ke dalam pos-pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan ini belum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kinerja keuangan pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah kecuali uang persediaan. Khusus pengeluaran dari uang persediaan melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh pengguna anggaran. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Belanja Dinas Pendidikan meliputi belanja operasi yang terdiri dari

belanja pegawai dan belanja barang, serta belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

- a. Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.
- b. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan. Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah.

Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai :

- a. Aspek keuangan
- b. Aspek sumber daya
- c. Aspek sarana dan prasarana
- d. Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakkan secara memadai. LAKIP dapat dapat dimasukan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dan juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin

maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNB (penerimaan Negara bukan pajak).

2. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.
4. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*policy accountability*).

2.3. Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan utamanya, setiap perusahaan selalu dihadapkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pemilihan berbagai alternatif yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pelaksanaan kebijakan yang telah diambil tersebut memerlukan adanya sebuah alat untuk mengkoordinasikan semua kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.

Anggaran menurut Catur Sasongko (2010:3) Anggaran adalah alat bagi manajemen yang memegang peranan penting dalam sistem pengendalian

manajemen sebuah perusahaan, terutama dalam proses perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*). Anggaran merupakan rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam unit kuantitatif.

Menurut Asri (2009:52) pengertian anggaran (*budget*) dapat disimpulkan yaitu rencana yang merupakan suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, serta mempunyai unsur jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang berarti bahwa apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-taksiran (*forecast*) tentang apa yang terjadi serta apa yang dilakukan dimasa yang akan datang. Anggaran (*budget*) merupakan salah satu bentuk rencana yang biasanya dibuat dalam suatu organisasi. Namun harus disadari bahwa tidak setiap rencana dapat disebut anggaran.

Menurut Jacson *et al* (2013:4) menyatakan “*Budget are plans dealing with the acquisition and use of resources over a specified time period*” . Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Secara lebih substansial, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dari definisi tersebut, kesimpulannya adalah suatu anggaran yang disusun berdasarkan kegiatan suatu organisasi dan memiliki jangka waktu tertentu untuk menyusunnya.

2.4. Perencanaan Anggaran

Robbin dan Coulter dalam Latif dkk (2014) mengatakan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Haryanto, dkk (2007), menjelaskan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa “anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”, sedangkan penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, dkk: 2007).

Dalam sistem penganggaran, semua kegiatan berawal dari rencana pembangunan jangka menengah yang diakomodir dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Dalam RKPD akan dijabarkan prioritas pembangunan dan plafon dari anggaran dari masing-masing kegiatan/program

pembangunan. Kemudian Prioritas kegiatan dijabarkan lebih rinci dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang menjadi input dalam menyusun RAPBD. RKA didokumentasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD). Selanjutnya dari RAPBD dikemas lagi dalam APBD dan dijabarkan dalam kegiatan dan program pembangunan yang telah disusun dalam RKPD, tentu saja semua kegiatan dan program tersebut harus didukung dengan dana untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan dan program tersebut. Sebagai bagian dari proses sistem administrasi yang baik maka penjabaran APBD harus didokumentasikan dalam daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) (Fadila, 2009).

Perencanaan anggaran merupakan Subsistem perencanaan strategis (*strategic planning*), secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah (Latif dkk, 2014).

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Tolak ukur yang digunakan untuk melihat

kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya porsi/kontribusi terhadap APBD. APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek- proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Kurniawan, 2012).

2.5. Pelaporan Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;6) dalam bukunya yang berjudul *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* menjelaskan: “Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundangundangan”.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;21), unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi

Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan. terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- b. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
- d. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;32), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelapooan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakn informmasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.6. Evaluasi Anggaran

Dalam melakukan sebuah kegiatan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, yang berguna melakukan untuk perubahan atau perbaikan pada kegiatan berikutnya (Salbia dan Risky, 2012).

Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan kinerja manajemen (Salbia dan Risky 2012).

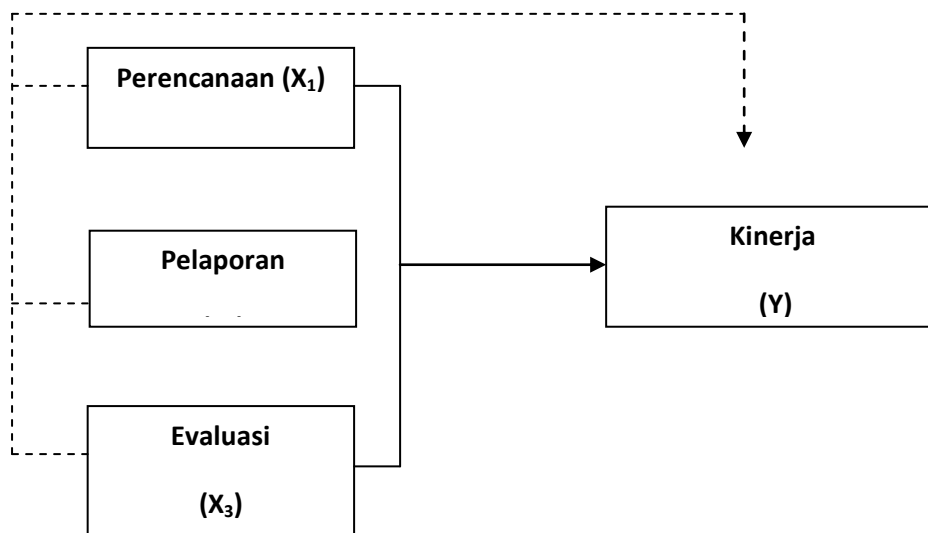
Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen, dalam pelaksanaan APBD setiap SKPD melakukan evaluasi untuk menilai kinerjanya masing-masing, apakah kinerjanya sesuai yang direncanakan atau sebaliknya untuk itu suatu anggaran harus selalu dievaluasi agar nantinya APBD dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk mempengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran (Latif, 2014).

2.7. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini kerangka pikir teoritis yang akan dikembangkan mengacu pada kajian teori pada Bab II. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1. : Skema Kerangka Pikir

2.8. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah :

5. Perencanaan anggaran (X₁) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

6. Pelaporan anggaran (X_2) berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
7. Evaluasi anggaran (X_3) berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
8. Perencanaan anggaran (X_1) pelaporan anggaran (X_2) dan evaluasi anggaran (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran serta kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai

dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perencanaan anggaran (X_1) pelaporan anggaran (X_2) dan evaluasi anggaran (X_3).

Tabel 3.1

Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator-Indikator	Skala
Perencanaan (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terukur 2. Prioritas penyusunan 3. Berdasarkan program 4. Sinkronisasi 5. Prinsip penyusunan 6. Kompilasi 7. Peraturan daerah 8. Penjabaran Visi Misi 	Ordinal
Pelaporan (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan laporan 2. Sesuai SAP 3. Sesuai prosedur 	Ordinal
Evaluasi (X ₃)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program 2. Target 3. Reward 	Ordinal
Kinerja (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan 2. Kejelasan 3. Penetapan Visi Misi 4. Indikator kinerja 5. Pelaksanaan analisis keuangan 6. Pelaporan atasan 7. Pengecekan program 8. Kontrol 9. Terakomodir 10. Penggunaan LAKIP 	Ordinal

Sumber : Luky Lrestawan (2015).

3.2.3. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:148) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi dan sampel adalah ASN yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

2. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan sampel ASN yang terlibat langsung dan telah memahami tentang anggaran yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak 30 orang. Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan pada pendapat Cohen, et.al (2007:101), bahwa semakin besar sampel dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, namun jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti adalah sebanyak 30 sampel.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Library Research

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. Field Research

Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang akan diteliti.
3. Kuisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Kinerja

a = Nilai Konstanta

b_1, b_2, b_{23} = Koefisien variabel

X_1 = Perencanaan

X_2 = Pelaporan

X_3 = Evaluasi

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

2. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Apakah jumlah *degree of freedom* (df) adalah 2 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka H_0 dapat ditolak. Membandingkan nilai t table, kita menerima H_a yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2016:98-99).

3. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2016:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Apabila nilai F lebih besar maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan biokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja peranagkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;

Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40600;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di provinsi Gorontalo (Lmebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5679);

Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun

Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1012);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kode etik Pegawai negeri di lingkungan Dinas perhubungan Parwisata dan keudayaan Kabupten Pohuwato adalah merupakan pedoman sikap, prinsip moral tingkah laku serta perbatan dalam penyelenggaraan perencanaan kepada masyarakat serta pegawai.
2. Mewujudkan sikap serta perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato yang memegang teguh etika dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Mencegah agar dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Parawisata dan Kebudayaan Kabupten Pohuwato tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab moral, dan
4. Menjaga agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dina Perhubungan Parawisata dan Kebudayaan Kabupten Pohuwato dapat menjalankan profesinya dengan baik dan beretika.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

Peraturan Gubernur Gorontalo Tentang Organisasi, dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintahan Daerah adalah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945/
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekeretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
7. Kepala adalah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
9. Bidang adalah kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;

11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitas.

4.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

1. Dinas Perhubungan Kabupten Pohuwato berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Dinas Perhubungan Kabupten Pohuwato dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonstrasi dibidang perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan:
- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang perhubunga:
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha dinas perhubungan:
- d. Pelaksanaan tugas konsultasi dan koordinasi dibidang perhubungan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui sekda

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato terdiri atas :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- d. Bidang Prasarana
- e. Bidang Pengembangan dan Keselematan



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel perencanaan anggaran (X_1) yang terdiri dari 8 item pernyataan, pelaporan anggaran (X_2) yang terdiri dari 3 item pernyataan dan evaluasi anggaran (X_3) yang terdiri dari 3 item pernyataan.

Sedangkan variabel terikat yaitu kinerja (Y) yang terdiri dari 10 item pernyataan. Sehingga total keseluruhan pernyataan untuk semua variabel sebanyak 24 item dan setiap itemnya akan direspons oleh 30 responden.

Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$150 - 30$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{-----}}{5} = 24$$

Tabel 4.1.

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Besar
105 – 129	Besar
80 – 104	Sedang
55 – 79	Kecil
30 – 54	Sangat Kecil

Sumber : Olahan Data 2023

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja (Y)

Hasil dalam penelitian ini yang menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dapat diperoleh tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 10 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Tanggapan Responden
Pada Variabel Kinerja (Y)**

Bobot	Y1			Y2			Y3			Y4			Y5		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	13	65	43	25	125	83	23	115	77	15	75	50	14	70	47
4	9	36	30	4	16	13	7	28	23	11	44	37	10	40	33
3	8	24	27	1	3	3	0	0	0	4	12	13	4	12	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	125	100	30	144	100	30	143	100	30	131	100	30	126	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait Aadanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab kurang setuju dengan skor

- 24, sehingga total skor item 1 adalah 125. Dengan demikian pernyataan pada item 1 masuk dalam kategori besar.
2. Pada pernyataan yang terkait kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin, diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab setuju dengan skor 16, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 2 adalah 144. Dengan demikian pernyataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.
 3. Pada pernyataan yang terkait Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi, diperoleh tanggapan responden sebanyak 23 responden atau 77% yang menjawab sangat setuju dengan skor 115, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28, sebanyak 1 responden atau 2% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 3 adalah 143. Dengan demikian pernyataan pada item 3 masuk dalam kategori sangat besar.
 4. Pada pernyataan yang terkait Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 4 adalah 131. Dengan demikian pernyataan pada item 4 masuk dalam kategori sangat besar.

5. Pada pernyataan yang terkait melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab setuju dengan skor 40, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 5 adalah 126. Dengan demikian pernyataan pada item 5 masuk dalam kategori besar.

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Pada Variabel Kinerja (Y)**

Bobot	Y6			Y7			Y8			Y9			Y10		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	17	85	57	13	65	43	14	70	47	26	130	87	27	135	90
4	8	32	27	11	44	37	9	36	30	2	8	7	3	12	10
3	4	12	13	5	15	17	5	15	17	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	2	3	2	4	7	2	4	7	0	0	0
1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	130	100	30	126	100	30	125	100	30	142	100	30	147	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

6. Pada pernyataan yang terkait membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, diperoleh tanggapan responden

sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 6 adalah 130. Dengan demikian pernyataan pada item 6 masuk dalam kategori sangat besar.

7. Pada pernyataan yang terkait melakukan pengecekan terhadap jalannya program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 7 adalah 126. Dengan demikian pernyataan pada item 7 masuk dalam kategori besar.
8. Pada pernyataan yang terkait pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 8 adalah 125. Dengan demikian pernyataan pada item 8 masuk dalam kategori besar.

9. Pada pernyataan yang terkait kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, diperoleh tanggapan responden sebanyak 26 responden atau 87% yang menjawab sangat setuju dengan skor 130, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab setuju dengan skor 8, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab kurang tidak dengan skor 4, sehingga total skor item 9 adalah 142. Dengan demikian pernyataan pada item 9 masuk dalam kategori sangat besar.
10. Pada pernyataan yang terkait LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 27 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 135, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 10 adalah 147. Dengan demikian pernyataan pada item 10 masuk dalam kategori sangat besar.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan (X_1)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 8 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Tanggapan Responden
Pada Variabel Perencanaan (X_1)**

Bobot	X1.1			X1.2			X1.3			X1.4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%

5	24	120	80	17	85	57	18	90	60	9	45	30
4	6	24	20	13	52	43	9	36	30	14	56	47
3	0	0	0	0	0	0	3	9	10	7	21	23
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	144	100	30	137	100	30	135	100	30	122	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait dalam perencanaan anggaran memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya, diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 1 adalah 144. Dengan demikian pernyataan pada item 1 masuk dalam kategori sangat besar.
2. Pada pernyataan yang terkait dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52, sehingga total skor item 2 adalah 137. Dengan demikian pernyataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.

3. Pada pernyataan yang terkait Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA, diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, sehingga total skor item 3 adalah 135. Dengan demikian pernyataan pada item 3 masuk dalam kategori sangat besar.
4. Pada pernyataan yang terkait adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Instansi dengan kinerja Instansi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab kurang setuju dengan skor 56, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 21, sehingga total skor item 4 adalah 122. Dengan demikian pernyataan pada item 4 masuk dalam kategori besar.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden

Pada Variabel Perencanaan (X1)

Bobot	X1.5			X1.6			X1.7			X1.8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	24	120	80	21	105	70	13	65	43	11	55	37
4	6	24	20	9	36	30	11	44	37	12	48	40
3	0	0	0	0	0	0	6	18	20	7	21	23

2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	144	100	30	141	100	30	127	100	30	124	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

5. Pada pernyataan yang terkait dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 5 adalah 144. Dengan demikian pernyataan pada item 5 masuk dalam kategori sangat besar.
6. Pada pernyataan yang terkait Pimpinan melakukan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sebelum diajukan dalam proses evaluasi, diperoleh tanggapan responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 105, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 6 adalah 141. Dengan demikian pernyataan pada item 6 masuk dalam kategori sangat besar.
7. Pada pernyataan yang terkait penetapan anggaran menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi anggaran, diperoleh tanggapan responden

sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 18, sehingga total skor item 7 adalah 127. Dengan demikian pernyataan pada item 7 masuk dalam kategori besar.

8. Pada pernyataan yang terkait dokumen rencana anggaran menjabarkan mengenai visi, misi, dan program Instansi yang ingin dicapai, diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab kurang setuju dengan skor 21, sehingga total skor item 8 adalah 124. Dengan demikian pernyataan pada item 8 masuk dalam kategori besar.

4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Pelaporan (X2)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 3 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6. Tanggapan Responden
Pada Variabel Pelaporan (X2)**

Bobot	X1.1			X1.2			X1.3		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	24	120	80	18	90	60	14	70	47
4	5	20	17	10	40	33	14	56	47
3	1	3	3	2	6	7	1	3	3

2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	143	100	30	136	100	30	131	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait setiap Instansi membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi, diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 1 adalah 143. Dengan demikian pernyataan pada item 1 masuk dalam kategori sangat besar.
2. Pada pernyataan yang terkait laporan keuangan Instansi yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab setuju dengan skor 40, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 2 adalah 136. Dengan demikian pernyataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.

3. Pada pernyataan yang terkait pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 3 adalah 131. Dengan demikian pernyataan pada item 3 masuk dalam kategori sangat besar.

4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Evaluasi (X3)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 5 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7. Tanggapan Responden
Pada Variabel Evaluasi (X3)**

Bobot	X1.1			X1.2			X1.3		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	11	55	7	14	70	47	20	100	67
4	19	76	63	16	64	53	9	36	30
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah	30	131	100	30	134	100	30	138	100
--------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 7% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab setuju dengan skor 75, sehingga total skor item 1 adalah 131. Dengan demikian pernyataan pada item 1 masuk dalam kategori sangat besar.
2. Pada pernyataan yang terkait adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab setuju dengan skor 64, sehingga total skor item 2 adalah 134. Dengan demikian pernyataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.
3. Pada pernyataan yang terkait setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada Instansi yang mencapai target anggaran, diperoleh tanggapan responden sebanyak 20 responden atau 67% yang menjawab sangat setuju dengan skor 100, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 3 adalah 138. Dengan demikian pernyataan pada item 3 masuk dalam kategori sangat besar.

4.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi apakah perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuisioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	11.788	12.392	
Perencanaan	.600	.286	.353
Pelaporan	.750	.364	.349
Evaluasi	.104	.436	.040

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda berikut : $Y = 11,788 + 0,600X_1 + 0,750X_2 + 0,104X_3$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda diatas, maka dapat di ketahui bahwa angka konstanta sebesar 11,788 yang artinya bahwa angka kinerja (Y) sebesar 11,788 apa bila jika variable yang lain bernilai 0. Koefisien regresi perencanaan (b_1) sebesar 0,600 yang artinya bahwa setiap perubahan variable perencanaan (b_1) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,600 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Koefisien regresi pelaporan (b_2) sebesar 0,750 yang artinya bahwa setiap perubahan variable pelaporan (b_2) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,750 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Koefisien regresi evaluasi (b_3) sebesar 0,104 yang artinya bahwa setiap perubahan variable evaluasi (b_3) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,104 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Sedangkan untuk melihat variasi naik turunnya variable kinerja (Y) dapat diketahui pada table koefisien determinasi (R^2) berikut :

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.186	3.155

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Berdasarkan pada table 4.22 Model Summary diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,270 atau 27%, yang berarti bahwa 27% variasi naik turunnya variabel kinerja (Y) mampu dijelaskan oleh variabel

perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3), namun sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial, variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t, jika dibandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai df sebesar $n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$, maka diperoleh df sebesar 26 dan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Selain itu, uji signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (5% atau 0,005) maka hipotesis penelitian tersebut dapat diterima, dan jika sebaliknya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,005 maka hipotesis ditolak.

Adapun hasil perhitungan regresi berganda untuk uji t atau uji parsial berdasarkan table berikut adalah :

Tabel 4.10. Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	.951	.350
Perencanaan	2.098	.046
Pelaporan	2.060	.050
Evaluasi	.238	.814

Model	t	Sig.
(Constant)	.951	.350
Perencanaan	2.098	.046
Pelaporan	2.060	.050
Evaluasi	.238	.814

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,098 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,046 < 0,05$).

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,060 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,238 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa

variabel evaluasi (X₃) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

4.3.2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel perencanaan (X₁), pelaporan (X₂) dan evaluasi (X₃) terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.11. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.818	3	31.939	3.208	.040 ^a
	Residual	258.882	26	9.957		
	Total	354.700	29			

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F_{hitung} sebesar 3,208 > F_{tabel} sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,040 < 0,005$. Dengan demikian variabel perencanaan (X₁), pelaporan (X₂) dan evaluasi (X₃) secara simultan

berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohnuato.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai $t_{hitung} 2,098 > t_{tabel} 2,056$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$.
2. Pelaporan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai $t_{hitung} 2,060 > t_{tabel} 2,056$ dengan nilai signifikansi 0,005 atau 5%.
3. Evaluasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai $t_{hitung} 0,238 < t_{tabel} 2,056$.
4. Perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai $F_{hitung} 3,208 > F_{tabel} 2,980$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,005$.

5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pimpinan hendaknya mempertahankan aspek perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat memberi manfaat bagi instansinya dalam melakukan perencanaan dan pelaporan anggaran sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
2. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato hendaknya lebih memperhatikan evaluasi kinerja anggaran demi tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dan bisa mengambil sampel yang lebih luas, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain selain variabel tersebut diatas yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato sebesar 73%, misalnya pelaksanaan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R.S. 2013. *Inovasi Pembelajaran*. Cetakan.I. Jakarta: Bumi Aksara

Abdul, Latif. 2014. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*.
Prenada Media Group. Jakarta.

Agustina, Asri, 2009. "*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan
Pajak Pada KPP Pratama*" SNA. Palembang, Tidak dipublikasikan

Sasongko(2010), *Anggaran*. Salemba empat, Jakarta.

Geg Edi Prasetyo. 2010. *Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah
Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher

Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program I B M S P S S*.

- Eko Haryanto dkk. 2007. *Sawi & Selada*. Penerbit penebar swadaya,Wisma Hijau.
Jl Raya Bogor KM 30. Mekar Sari Cimanggis. Depok 16952.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*,(Jakarta:
Penerbit Erlangga)
- Kumorotomo, Wahyu. 2005. *Akuntabilitas dalam teori dan praktek*. Yogyakarta:
MAP UGM dan Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. W. 2012. *Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga
Pokok Penjualan HPP Dengan Metode Average*’, Techno.com, 11,pp.12
- Kusuma, Arta Adi. 2013. *Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Hotel Muria semarang*. Skripsi UNES. Semarang
- L. Mathis, Robert & H Jackson. 2013. *Human Resource Management* (edisi 10).
Jakarta : Salemba Empat.
- Luky Lrestiwawan. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terha-
dap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada -
SKPD Kab. Ponorogo)*. Unismuh Ponorogo.
- Mahmudin, Ali. 2010. *Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis*.
Makalah Konfrensi Nasional Matematika XV. UNIMA Manado 30 Juni-
3 Juli 2010. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* : Cetakan Pertama.
Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Putri, 2014. *Hubungan Efikasi Diri Dan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi
Belajar Mata Kuliah Statistika Ekonomi Mahasiswa Angkt 2013 Jurusan
Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan T.A. 2013/2014*.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Legalitas. Jakarta
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta : Legalitas.

Salbiah, Ridha Rizky. 2012. *Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal. Universita Sumatera Utara. Vol 15, No 2.

Sriharioto. 2012. *Good Governance, Kompetensi KPPN & Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Kementerian/Lembaga*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

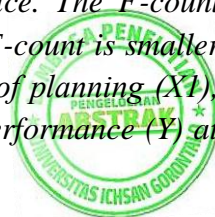
Kegiatan	Tahun 2021/2022									
	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar
Observasi										
UsulanJudul										
Penyusunan Proposal & Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

ABSTRACT

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, REPORTING, AND EVALUATION ON THE PERFORMANCE AT THE POHUWATO DISTRICT TRANSPORTATION OFFICE

Measurement of local government performance is directed at each work unit that has been authorized to manage resources as their field. Each work unit is a responsibility center that has its uniqueness. The purpose of this study is to find and analyze the effect of budget planning, reporting, and evaluation on the performance at the Pohuwato District Transportation Office, involving 30 respondents using multiple regression analysis tools. Based on the processed data results using SPSS-16, the obtained t-count value is $2.098 > t\text{-table value of } 2.056$, which means that planning (X1) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. Similarly, a significance value of 0.046 is obtained, greater than the significant level used, namely 0.05 or 5% ($0.046 < 0.05$). The t-count value of $2.060 > t\text{-table of } 2.056$ and supported by a significant value of 0.05 or 5% , which means that reporting (X2) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The t-count value is $0.238 < t\text{-table of } 2.056$, meaning that evaluation (X3) has a positive but insignificant effect on performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The F-count value of $3.208 > F\text{-table of } 2.980$ with the probability of error F-count is smaller than the specified error level (α) $0.040 < 0.005$. The variables of planning (X1), reporting (X2), and evaluation (X3) simultaneously affect the performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office.

Keywords: planning, reporting, evaluation, performance



ABSTRAK

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. PENGARUH PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yang melibatkan 30 responden dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,098 > \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar $2,056$. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,046$ yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu $0,05$ atau 5% ($0,046 < 0,05$). Nilai t_{hitung} sebesar $2,060 > t_{tabel}$ sebesar $2,056$ dan didukung dengan nilai signifikan $0,05$ atau 5% , yang berarti bahwa variabel pelaporan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Nilai t_{hitung} sebesar $0,238 < t_{tabel}$ sebesar $2,056$. Yang berarti bahwa variabel evaluasi (X_3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan nilai F_{hitung} sebesar $3,208 > F_{tabel}$ sebesar $2,980$ dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,040 < 0,005$. Dengan demikian variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: perencanaan, pelaporan, evaluasi dan kinerja

Lampiran 2

KUISIONER

Responden yang Terhormat,

Saya atas nama Reka A. Abubakar, akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato,”** sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Ichsan Gorontalo. Bersama ini saya mohon kesediaannya untuk mengisi data kuesioner yang diberikan, informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (v) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)

1	Sangat Tidak Setuju	(STS)
---	---------------------	-------

A. Perencanaan (X1)

No	Pernyataan Indikator Perencanaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dalam perencanaan anggaran memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya.					
2.	Dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).					
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA.					
4.	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Instansi dengan kinerja Instansi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
5.	Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
6.	Pimpinan melakukan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sebelum diajukan dalam					

	proses evaluasi.					
7.	Penetapan anggaran menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi anggaran					
8.	Dokumen rencana anggaran menjabarkan mengenai visi, misi, dan program Instansi yang ingin dicapai.					

B. Pelaporan (X2)

No	Pernyataan Indikator Pelaporan	SS	S	KS	TS	STS
1	Setiap Instansi membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2	Laporan keuangan Instansi yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
3	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					

C. Evaluasi (X3)

No	Pernyataan Indikator Evaluasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan					
2	Adanya evaluasi terhadap ekonomi,					

	efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan					
3	Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada Instansi yang mencapai target anggaran.					

D. Kinerja (Y)

No	Pernyataan Indikator Kinerja (Y)	SS	S	KS	TS	STS
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan					
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program					
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan					
6	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program					

9	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat					
10	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan					

Lampiran 3.

TABULASI DATA

N	PERENCANAAN (X1)								Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	5	5	5	4	4	5	4	36
2	5	4	5	4	5	5	5	3	36
3	5	5	5	4	5	4	5	5	38
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	4	5	5	4	4	34
6	5	4	5	4	5	4	4	5	36
7	5	5	4	3	5	5	3	3	33
8	5	4	5	4	4	5	4	3	34
9	5	5	3	4	5	5	4	4	35
10	5	4	4	3	5	5	3	4	33
11	5	5	5	5	4	5	4	3	36
12	5	4	5	5	4	4	5	4	36
13	4	5	4	3	5	5	5	5	36
14	4	4	3	4	5	4	5	5	34

15	5	5	4	4	5	5	3	4	35
16	5	5	4	5	5	5	4	5	38
17	5	4	5	5	5	4	3	4	35
18	5	5	5	3	5	5	4	4	36
19	5	5	5	3	5	5	5	5	38
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	5	5	5	4	4	5	4	36
22	5	4	5	4	5	5	5	3	36
23	5	5	5	4	5	4	5	5	38
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	4	4	4	5	5	4	4	34
26	5	4	5	4	5	4	4	5	36
27	5	5	4	3	5	5	3	3	33
28	5	4	5	4	4	5	4	3	34
29	5	5	3	4	5	5	4	4	35
30	5	4	4	3	5	5	3	4	33

z	PELAPORAN (X2)			Jml
	X1	X2	X3	
1	5	5	5	15
2	5	5	5	15

3	5	4	4	13
4	5	4	4	13
5	5	4	5	14
6	5	5	5	15
7	5	5	4	14
8	5	5	5	15
9	5	5	5	15
10	4	5	4	13
11	5	4	4	13
12	4	4	4	12
13	5	4	4	13
14	3	3	2	8
15	4	3	3	10
16	5	5	5	15
17	5	5	5	15
18	5	4	4	13
19	5	5	4	14
20	5	5	5	15
21	5	5	4	14
22	5	5	5	15
23	5	5	4	14
24	5	4	4	13
25	5	5	5	15
26	5	4	4	13

27	4	4	4	12
28	5	5	5	15
29	4	5	5	14
30	5	5	5	15

Z	EVALUASI (X3)			Jml
	X1	X2	X3	
1	4	4	4	12
2	5	5	5	15
3	5	5	5	15
4	4	5	5	14
5	4	4	4	12
6	4	4	4	12
7	5	4	5	14
8	5	5	4	14
9	5	4	5	14
10	5	5	5	15
11	5	5	5	15
12	4	4	5	13
13	4	5	5	14

14	4	4	5	13
15	4	4	4	12
16	5	5	5	15
17	4	4	2	10
18	4	5	5	14
19	4	5	5	14
20	4	4	5	13
21	4	5	5	14
22	4	4	5	13
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	5	13
28	4	4	4	12
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15

Z	KINERJA (Y)										Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	46
2	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	44
3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	44
7	3	4	5	4	2	5	5	4	5	5	42
8	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	42
9	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	43
10	3	5	4	4	3	3	4	5	5	5	41
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	42
13	3	4	5	5	4	5	3	4	2	5	40
14	3	5	5	5	3	5	2	4	2	5	39
15	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	42
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	46
18	4	5	4	4	3	1	5	4	5	5	40
19	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
21	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	46
22	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	44
23	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
24	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	46

25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	44
27	3	4	5	4	2	5	5	4	5	5	42
28	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	42
29	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	43
30	3	5	4	4	3	3	4	5	5	5	41

Lampiran 4

OUTPUT SPSS-16

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.186	3.155

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.186	3.155

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.818	3	31.939	3.208	.040 ^a
	Residual	258.882	26	9.957		
	Total	354.700	29			

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

b. Dependent Variable: Kinerja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.788	12.392		.951	.350
	Perencanaan	.600	.286	.353	2.098	.046
	Pelaporan	.750	.364	.349	2.060	.050
	Evaluasi	.104	.436	.040	.238	.814

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.788	12.392		.951	.350
Perencanaan	.600	.286	.353	2.098	.046
Pelaporan	.750	.364	.349	2.060	.050
Evaluasi	.104	.436	.040	.238	.814

a. Dependent Variable: Kinerja

Frequencies**Y1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	26.7	26.7	26.7
4	9	30.0	30.0	56.7
5	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	3.3	3.3	3.3

4	4	13.3	13.3	16.7
5	25	83.3	83.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	7	23.3	23.3	23.3
5	23	76.7	76.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	13.3	13.3	13.3
4	11	36.7	36.7	50.0
5	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	6.7	6.7	6.7
3	4	13.3	13.3	20.0
4	10	33.3	33.3	53.3

5	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	3.3	3.3	3.3
3	4	13.3	13.3	16.7
4	8	26.7	26.7	43.3
5	17	56.7	56.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	3.3	3.3	3.3
3	5	16.7	16.7	20.0
4	11	36.7	36.7	56.7
5	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	5	16.7	16.7	23.3
	4	9	30.0	30.0	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	4	2	6.7	6.7	13.3
	5	26	86.7	86.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	3	10.0	10.0	10.0
	5	27	90.0	90.0	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Frequencies**X11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	4	6	20.0	20.0	20.0
	5	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	13	43.3	43.3	43.3
	5	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10.0	10.0	10.0
	4	9	30.0	30.0	40.0
	5	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	23.3	23.3	23.3
	4	14	46.7	46.7	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0

X14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	23.3	23.3	23.3
	4	14	46.7	46.7	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	6	20.0	20.0	20.0
	5	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	9	30.0	30.0	30.0
	5	21	70.0	70.0	100.0

X16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	9	30.0	30.0	30.0
	5	21	70.0	70.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	6	20.0	20.0	20.0
	4	11	36.7	36.7	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	23.3	23.3	23.3
	4	12	40.0	40.0	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Frequencies**X21**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3.3	3.3	3.3
	4	5	16.7	16.7	20.0
	5	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	10	33.3	33.3	40.0
	5	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	14	46.7	46.7	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Frequencies**X31**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	19	63.3	63.3	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	16	53.3	53.3	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	4	9	30.0	30.0	33.3
	5	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN
 Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.: 080/PIP/LEMLIT-UNISAN/X/2022
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
 Di
 Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Reka A. Abubakar
 NIM : E2119147
 Fakultas : Fakultas Ekonomi
 Program Studi : Manajemen
 Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
 Judul penelitian : Pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Oktober 2022


DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN: 0929117202


 Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komp. Perkantoran Blokplan Marisa, Kab. Pohuwato, Gorontalo 96265

SURAT KETERANGAN

518/SK/PA/DISHUB-Phwt/179/IV/2023

Yang Bertandatangan dibawah ini :

NAMA : YUNUS MOHAMAD. S.Pd.,MH
NIP : 19690919 199401 1 001
PANGKAT GOL/RUANG : PEMBINA/IV b
JABATAN : KEPALA DINAS

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NAMA : REKA A. ABUBAKAR
NIM : E2119147
FAKULTAS : Manajemen/ Keuangan
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan sesuai Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 19229/PIP/LEMLIT-UNISAN/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, benar-benar telah melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Pengaruh Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Marisa, 13 April 2023

KEPALA DINAS



YUNUS MOHAMAD, S.Pd., MH
NIP. 19690919 199401 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001, STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 043/SRP/FE-UNISAN/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Reka A. Abubakar
NIM : E2119147
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

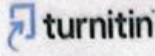
Gorontalo, 10 Maret 2023
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin



Dipindai dengan CamScanner


Similarity Report ID: 01d25211:29726601

12% Overall Similarity


Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

TOP SOURCES


The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

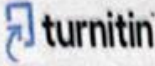
1	repository.ekuitas.ac.id <small>Internet</small>	2%
2	peraturan.bpk.go.id <small>Internet</small>	1%
3	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 <small>Submitted works</small>	1%
4	repository.dharmawangsa.ac.id <small>Internet</small>	<1%
5	kepegawaian.uma.ac.id <small>Internet</small>	<1%
6	repository.uinjkt.ac.id <small>Internet</small>	<1%
7	eprints.ubhara.ac.id <small>Internet</small>	<1%
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16 <small>Submitted works</small>	<1%


Dipindai dengan CamScanner
Sources overview

 **turnitin** Similarity Report ID: old:25211:29726601


9	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
10	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
12	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13	<1%
	Submitted works	
13	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
14	scribd.com	<1%
	Internet	
15	docplayer.info	<1%
	Internet	
16	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.helvetia.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
19	123dok.com	<1%
	Internet	
20	repository.widyatama.ac.id	<1%
	Internet	

 **Dipindai dengan CamScanner** Sources overview

 **turnitin**

Similarity Report ID: 01d25211:29726601

21	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
22	repository.usd.ac.id	<1%
	Internet	
23	docobook.com	<1%
	Internet	
24	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	<1%
	Internet	
25	eprints.polsri.ac.id	<1%
	Internet	
26	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
27	sinta.unud.ac.id	<1%
	Internet	

 Dipindai dengan CamScanner

Sources overview

CURRICULUM VITAE

1. Identritas Pribadi



Nama : Reka A. Abubakar
 NIM : E21.19.147
 Tempat/Tgl Lahir : Marisa, 19 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Angkatan : 2019
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Manajemen
 Konsentrasi : Keuangan
 Alamat : Desa Marisa Utara, Kec. Marisa
 Kabupaten Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 01 Marisa pada tahun 2013
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Marisa dan Lulus pada Tahun 2016
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA Negeri 1 Marisa tahun 2019
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.